



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1017/DJU/HK.00.1/9/2021
Lampiran : 6 (enam) halaman
Hal : Sosialisasi Implementasi SPPT-TI

Jakarta, 27 September 2021

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi (terlampir)

di

tempat

Memperhatikan surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Un.1742/HK.00.01/09/2021 tentang Sosialisasi Implementasi SPPT-TI yang akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 28 September 2021 dengan user dan password sebagaimana terlampir, dengan ini Saudara diminta untuk menunjuk Panitera Pengadilan Tinggi, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding serta Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri sebagaimana daftar terlampir agar mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



PRIM HARYADI

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. YM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

Nomor : Un.1742/HK.00.01/09/2021
Sifat : Biasa
Hal : Sosialisasi Implementasi SPPT-TI.

Jakarta, 22 September 2021

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
3. Ketua Pengadilan Tinggi Serang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
5. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
10. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
11. Ketua Pengadilan Tinggi Bangkulu
12. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung


Dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan target perluasan implementasi Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Tahun 2021-2022 tingkat Polda/Kejati/Pengadilan Tinggi/Kanwil Kumham.

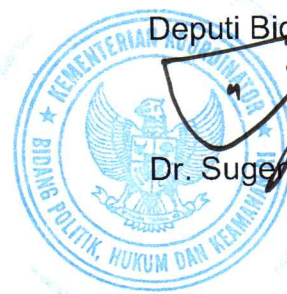
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kedepatian Bidkooor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam selaku Koordinator SPPT-TI akan melaksanakan Sosialisasi SPPT-TI yang terkait dengan operasional Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada :

Hari, tanggal : Selasa, 28 September 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aplikasi *Zoom*
Pimpinan : Deputi Bidkooor Hukum dan HAM
Link Zoom : *Meeting ID* : 844 5507 2795
Passcode : SPPT-TI

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan dapat menunjuk Panitera Pengadilan Tinggi, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Khusus Tipikor beserta 4 Hakim, serta Panitera, Penitera Muda Pidana, Panitera Muda Khusus Tipikor pada Pengadilan Negeri (daftar terlampir) untuk hadir sebagai peserta pada acara dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Deputi Bidkor Hukum dan HAM,

Dr. Sugeng Purnomo



Tembusan :

1. Menko Polhukam;
2. Sekretaris Mahkamah Agung;
3. Dirjen Badilum Mahkamah Agung;
4. Inspektur Kemenko Polhukam.

Contact Person :

- Sdr. L. Ziad Rahman Ghozali (081252868690)
- Sdr. Acep Suryadi (08176334135/021-3524225)

Lampiran Surat Undangan

Nomor : Un. 1742/HK.00.01/09/2021

Tanggal : 22 September 2021

DAFTAR UNDANGAN PENGADILAN NEGERI

A. Provinsi DKI Jakarta :

1. Jakarta Pusat;
2. Jakarta Utara;
3. Jakarta Barat;
4. Jakarta Timur;
5. Jakarta Selatan.

B. Provinsi Jawa Barat :

1. Bandung;
2. Kota Bandung;
3. Bogor;
4. Kota Bogor;
5. Bekasi;
6. Kota Bekasi;
7. Depok;
8. Cirebon;
9. Kota Cirebon;
10. Indramayu;
11. Sukabumi;
12. Kota Sukabumi;
13. Karawang;
14. Kota Tasikmalaya;
15. Garut;
16. Cianjur;
17. Subang;
18. Sumedang;
19. Majalengka;
20. Purwakarta;
21. Ciamis;

C. Provinsi Banten :

1. Tangerang;
2. Lebak;
3. Serang;
4. Pandeglang.

D. Provinsi Aceh :

1. Banda Aceh;
2. Aceh Utara;
3. Pidie;
4. Langsa;
5. Tamiang;
6. Bireun;
7. Aceh Timur;

8. Lhokseumawe.

E. Provinsi Sumatera Utara :

1. Pematang Siantar;
2. Medan;
3. Deli Serdang;
4. Langkat;
5. Labuhan Batu;
6. Asahan;
7. Batu Bara;
8. Serdang Bedagai;
9. Tapanuli Selatan;
10. Simalungun;
11. Binjai;
12. Sibolga;
13. Labuhan Batu Selatan;
14. Tapanuli Utara;
15. Karo;
16. Toba Samosir;
17. Mandailing Natal;

F. Provinsi Sumatera Selatan :

1. Palembang;
2. Musi Banyuasin;
3. Lubuk Linggau;
4. Ogan Komering Ilir;
5. Muara Enim;
6. Ogan Komering Ulu;
7. Lahat;
8. Prabumulih;
9. Ogan Komering Ulu Timur;

G. Provinsi Sumatera Barat :

1. Padang;
2. Pasaman Barat;
3. Pariaman.

H. Provinsi Riau :

1. Pekanbaru;
2. Rokan Hilir;
3. Kampar;
4. Bengkalis;
5. Indragiri Hulu;
6. Dumai;
7. Rokan Hulu;
8. Siak;
9. Palalawan;
10. Indragiri Hilir.

I. Provinsi Kep. Riau :

1. Batam;

2. Tanjung Pinang;
 3. Karimun.
- J. Provinsi Kep. Bangka Belitung :
1. Bangka;
 2. Pangkal Pinang;
 3. Bangka Barat.
- K. Provinsi Bengkulu :
1. Bengkulu;
 2. Bengkulu Utara;
 3. Ranjang Lembong.
- L. Provinsi Lampung :
1. Bandar Lampung;
 2. Lampung Selatan;
 3. Lampung Tengah;
 4. Tulang Bawang;
 5. Tanggamus;
 6. Lampung Timur;
 7. Lampung Utara;
 8. Way Kanan;
 9. Metro.
- M. Provinsi Jambi :
1. Jambi;
 2. Muaro Jambi;
 3. Bungo.

**RUNDOWN SOSIALISASI SPPT-TI
28 SEPTEMBER 2021**

NO.	AGENDA	SUBYEK	WAKTU	KET.
1.	Pembukaan : a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Doa	Pembawa Acara	09.00-09.10	
2.	Sambutan	Deputi Bidkooor Hukum dan HAM	09.10-09.15	
3.	Video Profil		09.15-09.25	
4.	Pemaparan Narasumber: a. Ditjen Badilum Mahkamah Agung; b. Direktorat TI dan Kerjasama Ditjenpas Kemenkumham; c. Pusdaskrimti Kejagung; d. Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri; e. Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas.	Moderator	09.25-10.25	
8.	Diskusi		10.25-11.25	
9.	Penutup	Pembawa Acara	11.25-11.40	